

Peran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Perindustrian Dalam Penempatan Ketenagakerjaan Kabupaten Banyuwangi

Udik Mashudi¹, Moh Andi Al Aris²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Abstrak

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi berperan penting dalam penempatan tenaga kerja melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Dinas ini merumuskan kebutuhan pasar kerja, mengidentifikasi potensi sumber daya manusia, dan menyediakan layanan verifikasi berkas Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) melalui sistem pelayanan satu atap. Selain itu, mereka melindungi hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai perjanjian kerja dan bekerja sama dengan perusahaan lokal seperti PT. INKA (Persero) untuk meningkatkan peluang kerja. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan program serta tantangan yang dihadapi. Faktor pendukung efektivitas dinas termasuk program terstruktur, sistem pengendalian internal yang baik, dan pelatihan keterampilan. Namun, tantangan seperti keterbatasan sarana prasarana, jumlah tenaga fungsional yang terbatas, dan rendahnya motivasi tenaga kerja perlu diatasi. Upaya optimalisasi dilakukan melalui pelatihan keterampilan seperti Caregiver dan Digital Marketing, serta program Job Fair dan Job Canvassing untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Dengan langkah-langkah ini, dinas berkontribusi dalam menciptakan tenaga kerja berkualitas di Kabupaten Banyuwangi.

Kata kunci: penempatan tenaga kerja, peran dinas, efektivitas dinas

Abstract

The Manpower, Transmigration, and Industry Office of Banyumas Regency plays an important role in workforce placement through planning, implementation, and evaluation to improve the quality of the workforce and reduce unemployment rates. This office formulates labor market needs, identifies potential human resources, and provides file verification services for Prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI) through a one-stop service system. In addition, it protects the rights of Indonesian Migrant Workers (PMI) according to work agreements and collaborates with local companies such as PT. INKA (Persero) to increase employment opportunities. Monitoring and evaluation are carried out to assess the success of the program and the challenges faced. Supporting factors for the effectiveness of the office include structured programs, a good internal control system, and skills training. However, challenges such as limited facilities and infrastructure, limited number of functional personnel, and low workforce motivation need to be overcome. Optimization efforts are carried out through skills training such as Caregivers and Digital Marketing, as well as Job Fair and Job Canvassing programs to bring job seekers together with companies. With these steps, this office also contributes to creating a quality workforce in Banyumas Regency.

Keywords: workforce placement, office role, office effectiveness

PENDAHULUAN

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri merupakan langkah strategis untuk memberikan hak dan kesempatan yang setara bagi tenaga kerja dalam mendapatkan pekerjaan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka. Proses penempatan ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, hingga pemberangkatan dan pemulangan.

Pelaksanaannya harus dilakukan secara terbuka, bebas, objektif, adil, dan tanpa diskriminasi, dengan tujuan menempatkan tenaga kerja pada posisi yang sesuai dengan keahlian mereka, serta tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, dan industri. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan dinas ini sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tersebut. Tugas tersebut mencakup berbagai bidang seperti tenaga kerja, hubungan industrial, pengembangan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, serta sekretariat.

Sebagai institusi pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian memiliki fungsi utama dalam mengelola urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Dinas ini berkomitmen untuk menjalankan strategi, kebijakan, dan program secara maksimal. Program-program yang dirancang bertujuan untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), mendorong tumbuhnya jiwa wirausaha di masyarakat, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan keterampilan, menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan perusahaan, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, penempatan TKI tidak hanya menjadi solusi untuk mengatasi pengangguran tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja melalui pengembangan kualitas SDM yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis data sekunder atau kuantitatif. Tujuannya adalah untuk memahami peran serta faktor pendukung dan penghambat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian dalam penempatan ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuwangi. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, observasi lapangan, dan telaah dokumen resmi untuk mendapatkan gambaran faktual tentang pelaksanaan program.

Survei ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian setempat. Data yang diperoleh meliputi data primer dari wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder dari dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi secara terstruktur untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Teknik purposive sampling diterapkan untuk memilih informan berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, metode pencatatan digunakan untuk mengumpulkan data yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau wawancara, dengan sumber data berasal dari majalah, internet, dan artikel terkait topik.

Kerangka teoritis dan hipotesis

Dalam artikel ini berfokus pada hubungan antara teknologi informasi dan transformasi proses audit internal di era digital. Berikut beberapa konsep teori yang kami temukan

Penempatan tenaga kerja

Penempatan tenaga kerja merupakan proses pelayanan yang bertujuan membantu pencari kerja memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan mereka, serta membantu pemberi kerja mengisi lowongan kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Menurut Soepomo, tenaga kerja mencakup semua individu yang mampu dan diizinkan melakukan pekerjaan, baik yang sudah bekerja maupun yang belum (pengangguran). Sementara itu, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan tenaga kerja sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat.

Asas ketenagakerjaan

Asas-asas ketenagakerjaan menjadi dasar dalam pelaksanaan penempatan tenaga kerja di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut meliputi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, usaha bersama dan kekeluargaan untuk mewujudkan cita-cita bersama secara terpadu, demokrasi yang berlandaskan Pancasila, keadilan dan kesetaraan dalam menikmati hasil usaha, keterbukaan dalam memberikan informasi terkait pekerjaan, kebebasan bagi pencari kerja dan pemberi kerja dalam memilih pekerjaan atau pekerja, objektivitas dalam menyeleksi pekerja berdasarkan keterampilan dan minat umum, tanggung jawab kepada Tuhan, bangsa, masyarakat, keluarga, dan perusahaan, kekeluargaan dan gotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan

bersama, kesadaran hukum dalam melaksanakan pekerjaan sesuai aturan yang berlaku, serta keseimbangan antara pekerjaan dengan kesehatan jasmani dan rohani.

Peran pemerintah daerah

Pemerintah memiliki peran penting dalam penempatan tenaga kerja melalui berbagai program pelatihan dan pelayanan. Di Kabupaten Melawi, Dinas Tenaga Kerja berperan sebagai pengelola anggaran sekaligus pelaksana program pelatihan kerja dari tahun 2017 hingga 2019. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar memiliki daya saing di pasar kerja serta mendukung wirausaha mandiri guna menekan angka pengangguran di daerah tersebut. Melalui upaya ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing tinggi.

Dari beberapa kerangka teoritis diatas ada beberapa hipotesis yang di angkat. Antara lain yaitu:

1. Apa peran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi dalam penempatan tenaga kerja?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat efektivitas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi dalam penempatan tenaga kerja?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan penempatan tenaga kerja yang berkualitas?

HASIL PEMBAHASAN

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi memiliki peran penting dalam proses penempatan tenaga kerja melalui berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Perencanaan dilakukan dengan merumuskan kebutuhan pasar kerja berdasarkan kondisi sosial ekonomi daerah, serta mengidentifikasi potensi sumber daya manusia dan peluang kerja yang tersedia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan program-program yang relevan dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja.

Salah satu peran utama dinas ini adalah memberikan pelayanan dan melakukan verifikasi berkas Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan ditempatkan di luar negeri. Proses ini dilakukan melalui sistem pelayanan satu atap di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi, di mana perusahaan pemberi kerja atau agen dapat mengajukan berkas yang dibutuhkan untuk proses penempatan tenaga kerja. Berkas tersebut kemudian diverifikasi oleh dinas untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaiannya.

Selain itu, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) apabila hak-haknya tidak dipenuhi oleh agen ketenagakerjaan. Perlindungan ini dilakukan dengan menuntut pemenuhan hak-hak tenaga kerja sesuai dengan surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua pihak dan diketahui oleh dinas.

Tidak hanya fokus pada pekerja migran, dinas juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lokal di Kabupaten Banyuwangi dalam perekrutan tenaga kerja. Salah satu contohnya adalah kolaborasi dengan PT. INKA (Persero), di mana dinas berperan aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait lowongan pekerjaan serta merekomendasikan calon tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi untuk ditempatkan di perusahaan tersebut. Dengan demikian, dinas berfungsi sebagai penghubung antara pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, sekaligus membantu pencari kerja memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi juga melakukan monitoring terhadap hasil penempatan tenaga kerja serta dampaknya bagi masyarakat. Evaluasi ini menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi keberhasilan program serta tantangan yang dihadapi dalam proses penempatan tenaga kerja, sehingga dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang. Secara keseluruhan, dinas ini berperan aktif dalam mengurangi tingkat pengangguran melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan program yang efektif, serta evaluasi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas tenaga kerja di daerah tersebut.

Faktor pendukung efektivitas peran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi meliputi adanya program-program yang terstruktur dengan baik serta sistem pengendalian internal yang memungkinkan kegiatan berjalan sesuai rencana. Hubungan internal yang

harmonis antar pihak terkait juga turut mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dinas. Selain itu, penyelenggaraan pelatihan keterampilan secara rutin menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), sehingga tenaga kerja lebih siap menghadapi kebutuhan pasar kerja.

Adapun faktor penghambat yang menjadi tantangan bagi dinas dalam menjalankan tugasnya. Keterbatasan sarana dan prasarana seperti kurangnya fasilitas di Balai Latihan Kerja (BLK) mengurangi efektivitas pelatihan yang diberikan. Jumlah tenaga fungsional sebagai pengantar kerja dan mediator juga masih terbatas sehingga menghambat proses penempatan tenaga kerja secara optimal. Tingginya angka pelanggaran norma ketenagakerjaan serta kecelakaan kerja menunjukkan adanya masalah dalam perlindungan tenaga kerja. Ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan persyaratan pekerjaan menjadi kendala besar terutama untuk peluang kerja di luar negeri. Rendahnya motivasi tenaga kerja untuk mencari pekerjaan di luar daerah juga membatasi peluang mereka untuk berkembang dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Untuk mengoptimalkan peran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan penempatan tenaga kerja berkualitas dan berdaya saing, berbagai upaya telah dilakukan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi, dinas menyelenggarakan berbagai program pelatihan keterampilan seperti Caregiver, Digital Marketing, Hidroponik, Tata Rias, Barbershop, Produksi Kopi, Las Listrik, dan lainnya agar masyarakat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, dinas juga mengadakan program Job Fair sebagai wadah mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan karyawan. Pada tahun 2023 terakhir kali kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan 70 perusahaan serta berhasil menyerap sekitar 700 pencari kerja dari 1.102 orang pelamar.

Program lainnya adalah Job Canvassing di mana dinas mendatangi langsung perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan yang kemudian disebarluaskan kepada masyarakat. Dinas juga memberikan pendampingan kepada industri lokal agar dapat berkembang lebih maju sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Upaya-upaya tersebut bertujuan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan serta pendistribusian tenaga kerja ke berbagai sektor industri sehingga dapat mendukung pengurangan angka pengangguran sekaligus menciptakan tenaga kerja yang berdaya saing tinggi di Kabupaten Banyuwangi

KESIMPULAN

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi berfungsi sebagai penghubung antara pencari kerja dan perusahaan, menyediakan layanan verifikasi berkas untuk Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), serta melindungi hak-hak pekerja migran. Dinas ini juga menjalin kerjasama dengan perusahaan lokal, seperti PT. INKA (Persero), untuk meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi aktif dalam memantau penempatan tenaga kerja untuk mengevaluasi keberhasilan program yang dijalankan. Secara keseluruhan, dinas ini memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui perencanaan yang matang dan pelaksanaan program yang efektif.

Faktor-faktor pendukung utama bagi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi meliputi adanya program yang terstruktur dengan baik, sistem pengendalian internal yang efektif, serta hubungan internal yang harmonis antara pihak-pihak terkait. Pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas juga berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja.

Namun, tantangan signifikan muncul dari faktor penghambat seperti keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah tenaga fungsional yang terbatas, serta ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan persyaratan pekerjaan. Tingginya angka pelanggaran norma ketenagakerjaan dan rendahnya motivasi tenaga kerja untuk mencari pekerjaan di luar daerah juga menjadi kendala. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti peningkatan fasilitas pelatihan dan penyelarasan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar sangat penting agar dinas dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Dinas juga melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penempatan tenaga kerja melalui program-program yang ada, termasuk pelatihan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja serta inisiatif lainnya untuk memudahkan masyarakat Banyuwangi dalam menemukan pekerjaan dan menjadi penghubung antara perusahaan dan pencari kerja.

Saran

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi perlu terus mengoptimalkan perannya dalam penempatan tenaga kerja karena masih ada daerah yang belum terjangkau informasi dan program yang disediakan oleh dinas. Meningkatkan fasilitas Balai Latihan Kerja juga sangat diperlukan agar warga lokal Banyuwangi dapat dengan mudah mengikuti berbagai program yang diadakan. Evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi harus dilakukan untuk mengetahui aspek-aspek yang perlu diperbaiki.

Pemantauan terhadap perusahaan-perusahaan yang telah bekerja sama juga penting untuk menilai kinerja tenaga kerja dari program-program yang telah dilaksanakan oleh dinas. Selain itu, komunikasi dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sudah ditempatkan oleh agen tenaga kerja perlu dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas tenaga kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi <https://webserver.banyuwangikab.go.id/skpd/unit/20101/dinas-tenaga-kerja-transmigrasi-dan-perindustrian.html> di akses pada 20 Februari 2025
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.07/MEN/IV/2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja
P. R. Benirobin, Muchlis Hamdi, Rossy Lambelanova , Reydonnizar Moenek4.Menfasilitasi Ketenaga Kerjaan Untuk Meningkatkan Investasi Publik di Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat.Jurnal Papatung: : Vol. 3 No. 2 Tahun 2020 66 ISSN: 2715-0186
Suhartoyo, Prinsip Persiapan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 3, August 2019
Bella febiolah amasya, Peran dinas tenagakerja, transmigrasi, dan perindustrian dalam mengurangi tingkat pengangguran dikabupaten banyuwangi pada tahun 2021-2022